



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang menyatakan Unit Pelaksana Teknis dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota, yang mana Unit Pelaksana Teknis tersebut dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah dan Badan Daerah;
- b. bahwa Dinas Pendidikan Kota Makassar bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, maka dalam hal tersebut perlu adanya Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal bagi Sekolah Dasar di Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
11. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Makassar.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan.
13. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat UPT-SPF SD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan.
14. Kepala UPT adalah Kepala UPT-SPF SD.

15. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
17. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasinya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR

Pasal 2

UPT-SPF dalam Peraturan Walikota ini, terdiri atas:

1. UPT-SPF SD Inpres Borong Jambu I;
2. UPT-SPF SD Inpres Borong Jambu II;
3. UPT-SPF SD Inpres Borong Jambu III;
4. UPT-SPF SD Inpres Bangkala I;
5. UPT-SPF SD Inpres Bangkala II;
6. UPT-SPF SD Inpres Bangkala III;
7. UPT-SPF SD Inpres Perumnas Antang I;
8. UPT-SPF SD Inpres Perumnas Antang II;
9. UPT-SPF SD Inpres Perumnas Antang III;
10. UPT-SPF SD Inpres Perumnas antang 1 / 1;
11. UPT-SPF SD Inpres Perumnas antang 2 / 1;
12. UPT-SPF SD Inpres Nipa-Nipa;
13. UPT-SPF SD Inpres Manggala;
14. UPT-SPF SD Inpres Unggulan Puri Taman Sari;
15. UPT-SPF SD Inpres Bitoa;
16. UPT-SPF SD Inpres Antang I;
17. UPT-SPF SD Inpres Antang II;
18. UPT-SPF SD Inpres Pannara;
19. UPT-SPF SD Negeri Pannara;
20. UPT-SPF SD Inpres Tamangapa;
21. UPT-SPF SD Inpres Kassi;
22. UPT-SPF SD Negeri Kassi;
23. UPT-SPF SD Inpres Kajenjeng;
24. UPT-SPF SD Negeri Parinring;
25. UPT-SPF SD Inpres Batua I;
26. UPT-SPF SD Inpres Batua II;
27. UPT-SPF SD Inpres Tello Baru II;
28. UPT-SPF SD Inpres Tello Baru III;
29. UPT-SPF SD Negeri Borong;
30. UPT-SPF SD Inpres Borong;
31. UPT-SPF SD Negeri Mamajang I;
32. UPT-SPF SD Negeri Mamajang II;
33. UPT-SPF SD Negeri Tanggul Patompo I;
34. UPT-SPF SD Negeri Tanggul Patompo II;
35. UPT-SPF SD Negeri Labuang Baji I;

36. UPT-SPF SD Negeri Labuang Baji II;
37. UPT-SPF SD Negeri Mawas;
38. UPT-SPF SD Negeri Cenderawasih;
39. UPT-SPF SD Negeri Cenderawasih I;
40. UPT-SPF SD Negeri Kompleks Kapota Yudha;
41. UPT-SPF SD Negeri Kompleks Kapota Yudha I;
42. UPT-SPF SD Negeri Kompleks Sambung Jawa;
43. UPT-SPF SD Inpres Parang;
44. UPT-SPF SD Inpres Sambung Jawa I;
45. UPT-SPF SD Inpres Sambung Jawa II;
46. UPT-SPF SD Inpres Sambung Jawa III;
47. UPT-SPF SD Inpres Bertingkat Labuang Baji;
48. UPT-SPF SD Inpres Bertingkat Mamajang I;
49. UPT-SPF SD Inpres Bertingkat Mamajang II;
50. UPT-SPF SD Inpres Bertingkat Mamajang III;
51. UPT-SPF SD Inpres Mangasa I;
52. UPT-SPF SD Negeri Minasa Upa;
53. UPT-SPF SD Negeri Gunung Sari I;
54. UPT-SPF SD Negeri Gunung Sari II;
55. UPT-SPF SD Negeri Tidung;
56. UPT-SPF SD Negeri Kompleks IKIP;
57. UPT-SPF SD Negeri Kompleks IKIP I;
58. UPT-SPF SD Inpres Cilallang;
59. UPT-SPF SD Negeri Rappocini;
60. UPT-SPF SD Negeri Mangasa;
61. UPT-SPF SD Negeri Aroepala;
62. UPT-SPF SD Inpres Minasa Upa;
63. UPT-SPF SD Inpres Minasa Upa I;
64. UPT-SPF SD Inpres BTN IKIP I;
65. UPT-SPF SD Inpres BTN IKIP II;
66. UPT-SPF SD Inpres Karunrung;
67. UPT-SPF SD Inpres Perumnas;
68. UPT-SPF SD Inpres Kassi - Kassi;
69. UPT-SPF SD Inpres Kassi - Kassi I;
70. UPT-SPF SD Inpres Perumnas I;
71. UPT-SPF SD Inpres Perumnas II;
72. UPT-SPF SD Inpres Perumnas IV;
73. UPT-SPF SD Inpres Tidung I;
74. UPT-SPF SD Inpres Unggulan BTN Pemda;
75. UPT-SPF SD Inpres Kampus IKIP;
76. UPT-SPF SD Inpres Gunung Sari Baru;
77. UPT-SPF SD Inpres Banta - Bantaeng I;
78. UPT-SPF SD Inpres Bertingkat Kelapa Tiga;
79. UPT-SPF SD Inpres Kelapa Tiga I;
80. UPT-SPF SD Inpres Maccini;
81. UPT-SPF SD Negeri IKIP Maccini;
82. UPT-SPF SD Inpres Maccini I/I;
83. UPT-SPF SD Negeri Maccini II;

84. UPT-SPF SD Negeri Monginsidi II;
85. UPT-SPF SD Negeri Monginsidi III;
86. UPT-SPF SD Inpres Monginsidi;
87. UPT-SPF SD Negeri Bawakaraeng III;
88. UPT-SPF SD Negeri Bawakaraeng I;
89. UPT-SPF SD Negeri Bawakaraeng II;
90. UPT-SPF SD Inpres Bawakaraeng;
91. UPT-SPF SD Negeri Maradekaya I;
92. UPT-SPF SD Negeri Maradekaya II;
93. UPT-SPF SD Negeri Maricaya II;
94. UPT-SPF SD Negeri Kip Bara - Baraya II;
95. UPT-SPF SD Negeri Bara - Baraya I;
96. UPT-SPF SD Inpres Bertingkat Bara - Baraya II;
97. UPT-SPF SD Negeri Kip Bara - Baraya I;
98. UPT-SPF SD Negeri Kip V Bara - Baraya;
99. UPT-SPF SD Negeri Unggulan Monginsidi I;
100. UPT-SPF SD Negeri Lariang Bangi I;
101. UPT-SPF SD Negeri Panaikang I;
102. UPT-SPF SD Negeri Panaikang II;
103. UPT-SPF SD Negeri Panaikang III;
104. UPT-SPF SD Negeri Karuwisi II;
105. UPT-SPF SD Negeri Pacinang;
106. UPT-SPF SD Negeri Pacinang I;
107. UPT-SPF SD Negeri Tamamaung;
108. UPT-SPF SD Negeri Tamamaung I;
109. UPT-SPF SD Negeri Pannyikkokang I;
110. UPT-SPF SD Negeri Pannyikkokang II;
111. UPT-SPF SD Negeri Batulaccu;
112. UPT-SPF SD Negeri Pampang;
113. UPT-SPF SD Inpres Tello Baru;
114. UPT-SPF SD Inpres Tello Baru 1/1;
115. UPT-SPF SD Inpres Tello Baru 1/2;
116. UPT-SPF SD Inpres Karuwisi I;
117. UPT-SPF SD Inpres Karuwisi II;
118. UPT-SPF SD Inpres Tamamaung I;
119. UPT-SPF SD Inpres Tamamaung II;
120. UPT-SPF SD Inpres Tamamaung III;
121. UPT-SPF SD Inpres Tamamaung IV;
122. UPT-SPF SD Inpres Pampang I;
123. UPT-SPF SD Inpres Pampang II;
124. UPT-SPF SD Inpres Panaikang 1/1;
125. UPT-SPF SD Inpres Panaikang II/1;
126. UPT-SPF SD Inpres Unggulan Todoppuli;
127. UPT-SPF SD Inpres Todoppuli I;
128. UPT-SPF SD Inpres Tamajene;
129. UPT-SPF SD Inpres Paropo;
130. UPT-SPF SD Negeri Bontorannu II;
131. UPT-SPF SD Negeri Patompo II;

132. UPT-SPF SD Negeri Mattoangin I;
133. UPT-SPF SD Negeri Mattoangin II;
134. UPT-SPF SD Inpres Mariso I;
135. UPT-SPF SD Inpres Mariso II;
136. UPT-SPF SD Inpres Mariso III;
137. UPT-SPF SD Negeri Kakatua;
138. UPT-SPF SD Negeri Rajawali;
139. UPT-SPF SD Negeri Garuda;
140. UPT-SPF SD Negeri Kalukuang I;
141. UPT-SPF SD Negeri Kalukuang II;
142. UPT-SPF SD Negeri Kalukuang III;
143. UPT-SPF SD Negeri Kalukuang IV;
144. UPT-SPF SD Inpres Ujung Pandang Baru I;
145. UPT-SPF SD Inpres Pannampu I;
146. UPT-SPF SD Inpres Pannampu II;
147. UPT-SPF SD Inpres Pannampu III;
148. UPT-SPF SD Inpres Galangan Kapal I;
149. UPT-SPF SD Inpres Galangan Kapal II;
150. UPT-SPF SD Inpres Galangan Kapal III;
151. UPT-SPF SD Inpres Galangan Kapal IV;
152. UPT-SPF SD Inpres Cambaya I;
153. UPT-SPF SD Inpres Cambaya II;
154. UPT-SPF SD Inpres Cambaya III;
155. UPT-SPF SD Inpres Cambaya IV;
156. UPT-SPF SD Inpres Tallo Tua I;
157. UPT-SPF SD Inpres Tallo Tua II;
158. UPT-SPF SD Negeri Tallo Tua 69;
159. UPT-SPF SD Inpres Bertingkat Kaluku Bodoa;
160. UPT-SPF SD Negeri Kaluku Bodoa;
161. UPT-SPF SD Inpres Buttatianang II;
162. UPT-SPF SD Inpres Bertingkat Rappojawa;
163. UPT-SPF SD Negeri Rappojawa No 71;
164. UPT-SPF SD Inpres Rappokalling I;
165. UPT-SPF SD Inpres Rappokalling II;
166. UPT-SPF SD Negeri Rappokalling 67;
167. UPT-SPF SD Negeri Rappokalling 67/1;
168. UPT-SPF SD Inpres Baraya I;
169. UPT-SPF SD Inpres Baraya II;
170. UPT-SPF SD Inpres Malimongan Baru;
171. UPT-SPF SD Negeri Beroanging;
172. UPT-SPF SD Inpres Layang III;
173. UPT-SPF SD Inpres Bung;
174. UPT-SPF SD Negeri Tamalanrea;
175. UPT-SPF SD Negeri Bontoramba;
176. UPT-SPF SD Negeri Bontoramba I;
177. UPT-SPF SD Negeri Kapasa;
178. UPT-SPF SD Negeri Bontojai;
179. UPT-SPF SD Negeri Pagandongan;

180. UPT-SPF SD Negeri Bontoa;
181. UPT-SPF SD Inpres Kantisang;
182. UPT-SPF SD Inpres Kera – Kera;
183. UPT-SPF SD Inpres Kampus Unhas;
184. UPT-SPF SD Inpres Kampus Unhas I;
185. UPT-SPF SD Inpres Tamalanrea I;
186. UPT-SPF SD Inpres Tamalanrea II;
187. UPT-SPF SD Inpres Tamalanrea III;
188. UPT-SPF SD Inpres Tamalanrea IV;
189. UPT-SPF SD Inpres Tamalanrea V;
190. UPT-SPF SD Inpres Tamalanrea VI;
191. UPT-SPF SD Inpres Lanraki I;
192. UPT-SPF SD Inpres Lanraki II;
193. UPT-SPF SD Inpres Kapasa;
194. UPT-SPF SD Inpres Lantebung;
195. UPT-SPF SD Inpres Bontojai;
196. UPT-SPF SD Inpres Bira I;
197. UPT-SPF SD Inpres Bira II;
198. UPT-SPF SD Inpres Maccini Sombala;
199. UPT-SPF SD Inpres Pa'baeng – Baeng;
200. UPT-SPF SD Inpres Pa'baeng - Baeng I;
201. UPT-SPF SD Negeri Maccini Sombala;
202. UPT-SPF SD Inpres Maccini Sombala I;
203. UPT-SPF SD Inpres Jongaya;
204. UPT-SPF SD Inpres Jongaya I;
205. UPT-SPF SD Inpres Mallengkeri I;
206. UPT-SPF SD Inpres Mallengkeri II;
207. UPT-SPF SD Inpres Mallengkeri Bertingkat;
208. UPT-SPF SD Inpres Mallengkeri Bertingkat I;
209. UPT-SPF SD Negeri Balang Boddong;
210. UPT-SPF SD Negeri Balang Boddong I;
211. UPT-SPF SD Negeri Kumala;
212. UPT-SPF SD Negeri Balang Baru;
213. UPT-SPF SD Negeri Balang Baru I;
214. UPT-SPF SD Negeri Mannuruki;
215. UPT-SPF SD Negeri Barombong;
216. UPT-SPF SD Inpres Barombong II;
217. UPT-SPF SD Inpres Barombong III;
218. UPT-SPF SD Inpres Hartaco Indah;
219. UPT-SPF SD Negeri Timbuseng II;
220. UPT-SPF SD Negeri Bayang;
221. UPT-SPF SD Inpres Andi Tonro;
222. UPT-SPF SD Negeri Sumanna;
223. UPT-SPF SD Negeri Kaccia;
224. UPT-SPF SD Inpres Gontang;
225. UPT-SPF SD Inpres Maccini Baru;
226. UPT-SPF SD Inpres Bontomanai;
227. UPT-SPF SD Inpres Bontoa;

228. UPT-SPF SD Negeri Parang Tambung I;
229. UPT-SPF SD Negeri Parang Tambung II;
230. UPT-SPF SD Negeri Timor;
231. UPT-SPF SD Negeri Sangir.
232. UPT-SPF SD Negeri Butung I;
233. UPT-SPF SD Negeri Butung II;
234. UPT-SPF SD Inpres Bertingkat Butung;
235. UPT-SPF SD Negeri Melayu;
236. UPT-SPF SD Negeri Melayu Muhammadiyah;
237. UPT-SPF SD Negeri Tabaringan V;
238. UPT-SPF SD Negeri Pattingalloang 1;
239. UPT-SPF SD Negeri Ujung Tanah I;
240. UPT-SPF SD Negeri Ujung Tanah II;
241. UPT-SPF SD Negeri Cambaya;
242. UPT-SPF SD Negeri Kodingareng;
243. UPT-SPF SD Negeri Lumu – Lumu;
244. UPT-SPF SD Negeri Barrang Lompo;
245. UPT-SPF SD Inpres Barrang Lompo;
246. UPT-SPF SD Inpres Tabaringan;
247. UPT-SPF SD Inpres Tabaringan I;
248. UPT-SPF SD Inpres Cambaya I;
249. UPT-SPF SD Inpres Cambaya II;
250. UPT-SPF SD Inpres Bertingkat Tabaringan I;
251. UPT-SPF SD Negeri Pongtiku I;
252. UPT-SPF SD Negeri Pongtiku II;
253. UPT-SPF SD Negeri Baraya I;
254. UPT-SPF SD Negeri Baraya II;
255. UPT-SPF SD Negeri Gaddong II;
256. UPT-SPF SD Negeri Bertingkat Layang;
257. UPT-SPF SD Negeri Layang IV/72;
258. UPT-SPF SD Inpres Layang Tua I;
259. UPT-SPF SD Inpres Layang Tua II;
260. UPT-SPF SD Negeri Sudirman I;
261. UPT-SPF SD Negeri Sudirman II;
262. UPT-SPF SD Negeri Sudirman III;
263. UPT-SPF SD Negeri Sudirman IV;
264. UPT-SPF SD Negeri Mangkura I;
265. UPT-SPF SD Negeri Mangkura II;
266. UPT-SPF SD Negeri Mangkura III;
267. UPT-SPF SD Negeri Mangkura IV;
268. UPT-SPF SD Negeri Mangkura V;
269. UPT-SPF SD Negeri Lanto Daeng Pasewang;
270. UPT-SPF SD Negeri Gotong - Gotong I;
271. UPT-SPF SD Negeri Bulogading;
272. UPT-SPF SD Negeri Percontohan PAM;
273. UPT-SPF SD Negeri Daya II;
274. UPT-SPF SD Inpres Lae - Lae II;
275. UPT-SPF SD Inpres Mannuruki II;

276. UPT-SPF SD Negeri Bulurokeng I;
277. UPT-SPF SD Negeri Baddoka;
278. UPT-SPF SD Negeri Daya I;
279. UPT-SPF SD Inpres Daya;
280. UPT-SPF SD Inpres Sudiang;
281. UPT-SPF SD Inpres Laikang;
282. UPT-SPF SD Inpres Pai I;
283. UPT-SPF SD Negeri Nusa Harapan Permai;
284. UPT-SPF SD Negeri Malewang;
285. UPT-SPF SD Inpres Bakung II;
286. UPT-SPF SD Negeri Sipala I;
287. UPT-SPF SD Inpres Tangkala II;
288. UPT-SPF SD Inpres Bakung I;
289. UPT-SPF SD Negeri Batutambung;
290. UPT-SPF SD Negeri Sudiang;
291. UPT-SPF SD Inpres Pagandongan I;
292. UPT-SPF SD Negeri Pai;
293. UPT-SPF SD Negeri Bulurokeng;
294. UPT-SPF SD Negeri Sipala II;
295. UPT-SPF SD Inpres Baddoka;
296. UPT-SPF SD Inpres Mannuruki I;
297. UPT-SPF SD Inpres Paccerakang;
298. UPT-SPF SD Inpres Tangkala I;
299. UPT-SPF SD Inpres Mandai;
300. UPT-SPF SD Inpres Kalang Tubung II;
301. UPT-SPF SD Negeri Pajjaiang;
302. UPT-SPF SD Inpres Pajjaiang II;
303. UPT-SPF SD Inpres Kalang Tubung I;
304. UPT-SPF SD Inpres Mangga Tiga;
305. UPT-SPF SD Negeri Mandai;
306. UPT-SPF SD Negeri Paccerakang;
307. UPT-SPF SD Inpres Pagandongan II;
308. UPT-SPF SD Inpres Pajjaiang;
309. UPT-SPF SD Inpres Pai II;
310. UPT-SPF SD Negeri Lakkang;
311. UPT-SPF SD Negeri Barrang Caddi;
312. UPT-SPF SD Inpres Barrang Caddi II;
313. UPT-SPF SD Negeri Langkai; dan
314. UPT-SPF SD Inpres Lae - Lae I.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPT-SPF SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh Kepala UPT yang dijabat oleh fungsional guru yang diberi tugas tambahan dan berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Struktur Organisasi UPT-SPF SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. urusan tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT-SPF SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan formal SD dan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan pendidikan formal SD;
 - b. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan administrasi pada SD.
- (2) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat persuratan serta pengarsipan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan sebagian tugas teknis tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
URAIAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Uraian tugas berdasarkan tugas dan fungsi dari Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas:
 - a. merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi, misi dan tujuan UPT;
 - b. menyusun rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung peningkatan mutu lulusan;
 - c. menyusun rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah berdasarkan rencana kerja jangka menengah;
 - d. menyusun rencana program sekolah;
 - e. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sekolah per semester dan tahunan;
 - f. melaksanakan pengembangan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan;
 - g. melaksanakan pengelolaan perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yang efektif;
 - h. melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
 - i. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
 - j. melaksanakan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;
 - k. melaksanakan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
 - l. melaksanakan proses pembelajaran;

- m. melaksanakan pengelolaan keuangan sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien;
 - n. melaksanakan pengelolaan sistem informasi sekolah dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah;
 - o. melaksanakan pemantauan (monitoring), evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
 - p. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat dan dewan pendidikan;
 - q. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - r. melaksanakan ketatausahaan dan kerumatanngan sekolah; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Uraian tugas berdasarkan tugas dari Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terdiri atas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja sekolah;
 - b. melakukan penyusunan rencana program dan anggaran sekolah;
 - c. melakukan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran sekolah;
 - d. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang dan pembayaran lainnya;
 - e. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai di lingkungan UPT;
 - f. melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. melakukan kerjasama dibidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga pendidikan;
 - h. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan dan kearsipan dilingkungan sekolah;
 - i. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan sekolah;
 - j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian barang milik daerah/negara di lingkungan sekolah;
 - k. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan sekolah;
 - l. melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan sekolah;
 - m. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen urusan tata usaha;
 - n. melakukan penyusunan laporan urusan tata usaha dan konsep laporan sekolah;
 - o. melaksanakan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Pengangkatan jabatan fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

BAB VII KOORDINATOR WILAYAH

Pasal 8

- (1) Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
- (2) Koordinator wilayah kecamatan sebagai unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau ASN lainnya.

- (3) Koordinator wilayah kecamatan ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan jabatan non struktural yang dilaksanakan oleh jabatan pelaksana dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan atas usul Kepala UPT.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan tugas teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT, Kepala Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (4) Kepala UPT wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta membina dan menilai kinerja bawahan.
- (5) Apabila kepala UPT berhalangan melaksanakan tugasnya, maka kepala UPT dapat menunjuk Urusan Tata Usaha untuk mewakili.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 Agustus 2019

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH. IQBAL S. SUHAEB

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 26 Agustus 2019

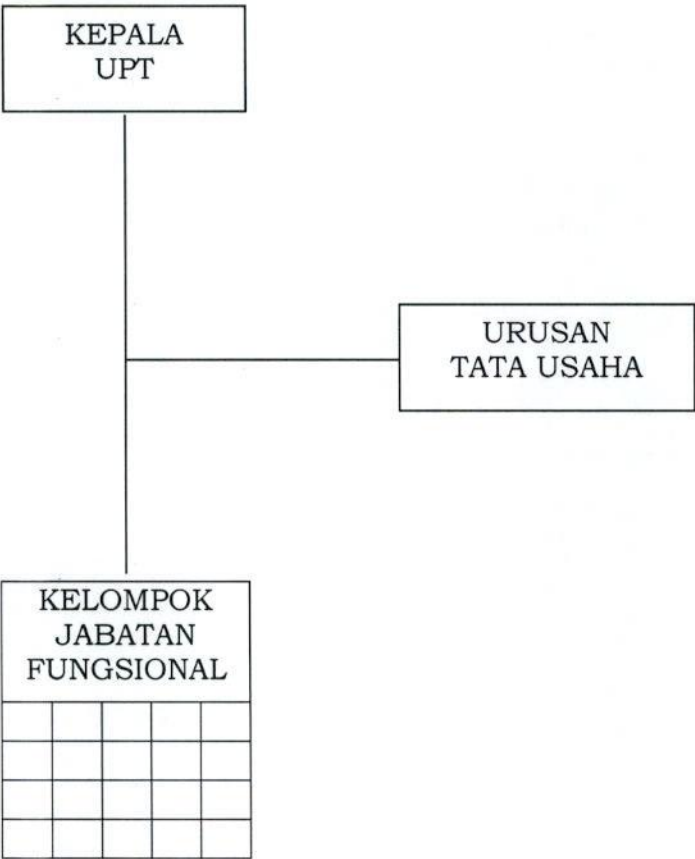
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M ANSAR

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 58 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH DASAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH DASAR



Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH. IQBAL S. SUHAEB